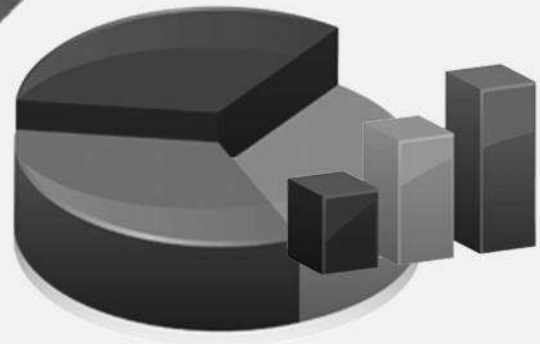


LAPORAN KINERJA PUSDIKLAT BPS — 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



LAPORAN KINERJA PUSDIKLAT BPS

2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) Tahun 2015 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat BPS berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 memberikan informasi hasil kinerja melalui pengukuran pencapaian kinerja visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusdiklat BPS Tahun 2015. Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pusdiklat BPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama tahun 2015.

Isi dari Laporan Kinerja ini merupakan masukan dari seluruh unit kerja di Pusdiklat BPS, untuk itu kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Januari 2016

Pusdiklat BPS

Kepala,



Dr. Heru Margono, M.Sc.

NIP. 19610214 198312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Landasan Hukum	4
Bab II Perencanaan Kinerja	6
2.1 Rencana Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019	6
2.2 Indikator Kinerja Utama	10
2.3 Rencana Kinerja	11
2.4 Anggaran Tahun 2015	13
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2014	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	16
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014	16
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 Terhadap Tahun 2010-2014	48
3.3 Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 Terhadap Target Renstra 2015-2019	50
3.4 Prestasi Yang Dicapai Tahun 2015	52
3.5 Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2015	53
3.6 Upaya Efisiensi Di Pusdiklat BPS Tahun 2015	53
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2015	54
Bab IV Penutup	57
4.1 Tinjauan Umum	57
4.2 Tindak Lanjut	58
Lampiran-lampiran :	
1 Struktur Organisasi Pusdiklat BPS	
2 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019	
3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusdiklat BPS Tahun 2015	
4 Reviu Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2015	
5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	
6 Sumber Daya Manusia (SDM)	
7 Kalender Diklat	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pusdiklat BPS Tahun 2015	11
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pusdiklat BPS Tahun 2015	13
Tabel 3. Pagu Anggaran Belanja Pusdiklat BPS Tahun 2015	14
Tabel 4. Penetapan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015	14
Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015	17
Tabel 6. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Target PK 2015 Pusdiklat BPS Tahun 2015	19
Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Terhadap Target PK 2015 Pusdiklat BPS Tahun 2015	47
Tabel 8. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Target Renstra 2015 Pusdiklat BPS, Tahun 2015	51
Tabel 9. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Terhadap Target Renstra 2015 Pusdiklat BPS, Tahun 2015	52
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program Pusdiklat BPS Tahun 2015	54
Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Sumber Biaya Pusdiklat BPS Tahun 2015	55
Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2015	56

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan ke-97 BPS Tahun 2015	20
Gambar 2.	Peserta Diklatpim Tingkat III Angkatan ke-32 BPS Tahun 2015 Bersama pimpinan BPS RI dan LAN RI	22
Gambar 3.	Peserta Diklat Fungsional Statistisi Ahli Angkatan ke-15 BPS Tahun 2015	24
Gambar 4.	Kegiatan Belajar Mengajar Peserta Diklat Rancang Bangun Kurikulum BPS Tahun 2015	25
Gambar 5.	Peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Angkatan ke-11 BPS Tahun 2015	26
Gambar 6.	Peserta Regional Course Tahun 2015 Bersama Pengajar dan Pimpinan Pusdiklat BPS	27
Gambar 7.	Kegiatan Belajar Mengajar Peserta Regional Course Tahun 2015	27
Gambar 8.	Kegiatan Ujian Sertifikasi Secara Online Peserta Diklat Barang Jasa Gelombang I (Angkatan I s.d. IV) Tahun 2015	28
Gambar 9.	Acara Pembukaan Peserta Diklat Simpeg On-Line Tahun 2015	29
Gambar 10.	Acara Pembukaan Peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gelombang II (Angkatan V s.d. VIII) Tahun 2015	30
Gambar 11.	Acara Pembukaan Peserta Diklat Teknis Infografis Tahun 2015	31
Gambar 12.	Diagram Alir Seleksi Pegawai Izin Belajar	39
Gambar 13.	Diagram Alir Seleksi Pegawai Tugas Belajar	43
Gambar 14.	Grafik Jumlah Izin Belajar S2 dan S3 Tahun 2011-2015	49
Gambar 15.	Grafik Jumlah Tugas Belajar S2 dan S3 Tahun 2011-2015	50
Gambar 16.	Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2015	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan masyarakat maupun pemerintah untuk mencapai visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakannya dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) merupakan salah satu satuan kerja (satker) yang berada di bawah naungan lembaga pemerintah non kementerian, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS RI di bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan teknis statistik dan komputer. Selain itu juga menyelenggarakan tugas belajar dan mengelola izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPS RI. Sebagai unsur pelaksana di bidang pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat BPS berperan penting dan mempunyai aspek strategis meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pegawai di lingkungan BPS RI. Keberhasilan dalam meningkatkan aspek strategis tersebut dapat dilihat dari tingginya capaian kinerja yang diraih. Untuk mengetahui ukuran kinerja yang telah dicapai dan bagaimana upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya, Pusdiklat BPS mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat eselon II pada BPS RI yang lokasinya berada di Jalan Raya Jagakarsa No. 70. Jakarta Selatan 12620.

2. Tugas

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan fungsional serta pendidikan dan pelatihan teknis statistik dan komputer.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah:

1. Kepala

Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi dua Kepala Subbagian setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha Umum; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga

3. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan

- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan
- 4. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:
 - a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

1.3. Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusdiklat BPS memiliki dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, SubBagian, SubBidang dan Seksi Badan Pusat Statistik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menetapkan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan program dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam Rencana Strategis kementerian/lembaga dan RPJM Daerah. Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga atau RPJM kementerian/lembaga yaitu suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga tersebut dalam lima tahun ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kepala Badan Pusat Statistik melalui Peraturan Kepala BPS Nomor 40 tahun 2015 telah menetapkan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra masing-masing.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan BPS, Kepala Pusdiklat BPS dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 mengacu pada Renstra BPS 2015-2019. Renstra Pusdiklat BPS dijadikan sebagai acuan bagi seluruh aparat Pusdiklat BPS untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Rencana strategis Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019 adalah:

1. Visi

“Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan misi Pusdiklat BPS, yaitu :

1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.
4. Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Misi yang telah dikemukakan di atas maka disusun tujuan program yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pusdiklat: tenaga pengajar, pengelola dan penyelenggara melalui kegiatan proses pembelajaran dan proses administrasi keuangan yang dapat diikuti.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan *hardware, software* dan modul yang lengkap.
4. Membentuk *network* dengan unit kerja BPS dan instansi lain sekaligus mengembangkan budaya *continous learning* melalui forum diskusi.

5. Mengembangkan berbagai diklat statistik terapan dan komputer yang menjadi kebutuhan *stakeholder*.

4. Sasaran

Atas dasar tujuan di atas, maka disusunlah sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya layanan tata usaha Pusdiklat BPS
2. Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan.

5. Kebijakan

Dari beberapa sasaran yang ingin dicapai, maka langkah berikutnya adalah menentukan cara bagaimana akan mencapainya melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah dan ragam ketrampilan SDM dengan mengupayakan penambahan SDM dan melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi serta manajemen.
3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi para pengajar/ Widyaiswara (WI) Pusdiklat melalui berbagai diklat dan tugas belajar.
4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi para WI dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pengiriman WI untuk mengikuti Diklat *Training of Trainers* (TOT) WI pada Lembaga Administrasi Negara (LAN).
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana gedung yang ada.

6. Program-Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Pusdiklat BPS menjalankan program pembangunan yang terintegrasikan ke dalam program pembangunan BPS Tahun 2015 sehingga tujuan dari program tersebut merupakan bagian integral dari program BPS. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi standar baik di BPS RI maupun luar BPS RI melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis statistik, teknis komputer, manajemen dan administrasi serta izin belajar dan tugas belajar.

2. Program Pengembangan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV berbasis kompetensi

Program ini bertujuan untuk membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV berbasis kompetensi dalam tugas jabatan eselon empat sehingga meningkatkan kemampuan *leadership* dan mengurangi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat eselon empat didasarkan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai seorang pejabat eselon empat.

3. Program Pengembangan Diklat Kepemimpinan Tingkat III berbasis kompetensi

Program ini bertujuan untuk membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III berbasis kompetensi dalam tugas jabatan eselon tiga sehingga meningkatkan kemampuan *leadership* dan mengurangi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat eselon tiga didasarkan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai seorang pejabat eselon tiga.

4. Program Pengembangan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III berbasis kompetensi

Program ini bertujuan untuk membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III berbasis kompetensi. Diklat ini tidak hanya membentuk kompetensi tetapi membantu membentuk *character* yang profesional dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara serta tertanamnya etika publik yang tinggi.

5. Program Pengembangan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli berbasis kompetensi

Program ini bertujuan untuk membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan fungsional statistisi tingkat ahli berbasis kompetensi statistik lanjutan dalam tugas jabatan fungsional tingkat ahli sehingga mengurangi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat fungsional tingkat ahli didasarkan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai seorang fungsional tingkat ahli.

6. Program Pengembangan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli berbasis kompetensi

Program ini bertujuan untuk membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan fungsional pranata komputer tingkat ahli berbasis kompetensi sehingga mengurangi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat fungsional tingkat ahli didasarkan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai seorang fungsional tingkat ahli.

7. Program Pengembangan Diklat Teknis Substantif Statistik berbasis kompetensi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pegawai BPS dalam bidang teknis sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan statistik dan meningkatkan capaian kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan data yang berkualitas.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pusdiklat BPS menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pusdiklat BPS Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan Pendidikan dan Pelatihan	a. Persentase peserta Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan memuaskan	Laporan Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		b. Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Laporan Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		c. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Laporan Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		d. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	Laporan Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		e. Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Laporan Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang transparan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

2.3. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusdiklat BPS mengacu kepada Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan kegiatan pada tahun 2015.

Program utama di Pusdiklat BPS adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya. Selain itu terdapat juga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT tahun anggaran yang akan dilaporkan.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya berupa Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS) yang terdiri dari *output*/hasil sebagai berikut:

1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS
 - Rintisan Pendidikan Gelar
 - Diklat Prajabatan Golongan I dan II
 - Diklat Prajabatan Golongan III
 - Diklatpim Tingkat IV
 - Diklatpim Tingkat III
 - Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli
 - Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli
 - Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar
 - Diklat Teknis Substantif Statistik
 - Penggunaan PNB
 - Keterpaduan Penyelenggaraan Diklat
2. Layanan Perkantoran
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS berupa Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS dan Operasional Perkantoran Lainnya yang terdiri dari *output*/hasil sebagai berikut:

1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3. Gedung/Bangunan

Pusdiklat BPS juga menentukan target kegiatan dari indikator kinerja utama untuk tahun 2015 ke dalam RENCANA KINERJA TAHUNAN PUSDIKLAT BPS 2015 yaitu :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pusdiklat BPS Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33
		Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%
		Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%
		Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242
2	Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67

2.4. Anggaran Tahun 2015

Pelaksanaan program kegiatan Pusdiklat BPS pada tahun 2015 dibiayai APBN dan penggunaan PNPB yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2015, dengan nilai Pagu anggaran yang diberikan ke Pusdiklat BPS untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran pendidikan dan pelatihan selama tahun 2015 adalah sebesar 48,233 milyar rupiah. Anggaran tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program yaitu : (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Adapun jenis belanja dalam anggaran Pusdiklat BPS dibedakan

menjadi tiga pos pengeluaran yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengeluaran belanja pegawai dikhususkan untuk gaji dan tunjangan, pengeluaran belanja barang meliputi belanja untuk keperluan penyelenggaraan diklat, keperluan kantor sehari-hari, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan, serta pengeluaran belanja modal yaitu meliputi pengadaan sarana dan prasarana yang merupakan aset tetap.

Tabel 3. Pagu Anggaran Belanja Pusdiklat BPS Tahun 2015

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
054.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	44.881.380.000,-
054.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	3.351.971.000,-
Jumlah Pusdiklat BPS		48.233.351.000,-

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan Kinerja Pusdiklat BPS dibuat sebagai acuan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun. Pada tahun 2015 Pusdiklat BPS menyusun Penetapan Kinerja seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penetapan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Kelas Persen	33 90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
		Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	90%
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	Persen	90%
		Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	Persen	100%
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	Pegawai	242
2	Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	67

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi Pusdiklat BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun anggaran. Akuntabilitas kinerja juga digunakan sebagai umpan balik bagi Pusdiklat BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

Pada bab ini akan disajikan analisis akuntabilitas kinerja yang berisi tentang capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2015 terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) 2015 serta ulasan penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target. Selain itu diulas pula perkembangan capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2015 terhadap tahun 2010-2014 dan capaian kinerja terhadap target Renstra 2015-2019. Terakhir akan disajikan kegiatan prioritas dan realisasi anggaran Pusdiklat BPS tahun 2015.

3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015

Capaian kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Pusdiklat BPS untuk setiap pernyataan kinerja sasaran/tujuan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pusdiklat BPS yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015

No	Sasaran/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33	41	120,00
		Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	96,80%	107,56
		Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	100%	111,11
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	87,95%	97,72
		Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100,00
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	242	100,00
2	Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	58,54	87,37
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran/Tujuan					103,39

Bila dilihat perbandingan antara realisasi dengan target PK 2015, secara umum pencapaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2015 menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang pendidikan dan pelatihan, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103,39 persen seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Pencapaian sasaran yang sangat memuaskan yaitu pada terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan, sedangkan pencapaian sasaran terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan masih belum memuaskan.

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan, tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar meskipun masih ada beberapa indikator yang belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai usaha akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

A. Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, Pusdiklat juga menyelenggarakan pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi pegawai BPS yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan itu, sasaran pertama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Sasaran tersebut diuraikan dalam 6 (enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target, 2 (dua) indikator sesuai dengan target, dan terdapat 1 (satu) indikator yang kurang dari target yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Target PK 2015 Pusdiklat BPS Tahun 2015

No	Sasaran/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33	41	120,00
		Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	96,80%	107,56
		Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	100%	111,11
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	87,95%	97,72
		Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100,00
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	242	100,00

A.1. Indikator 1 : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pegawai, diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang memadai baik dari sisi kemampuan teknis

maupun manajerial. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pembinaan pegawai baik berupa diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan.

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS. Diklat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan budaya kerja organisasi agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan dibagi menjadi dua jenjang yaitu Diklat Prajabatan Golongan I dan II yaitu untuk CPNS Golongan I atau II dan Diklat Prajabatan Golongan III untuk CPNS Golongan III.



Gambar 1. Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan ke-97 BPS Tahun 2015

Pada tahun 2015 Pusdiklat BPS melaksanakan Diklat Prajabatan Golongan I dan II serta Golongan III. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) nomor 38 dan 39 Tahun 2014, pelaksanaan

Prajabatan mulai tahun 2015 dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 2 tahap dengan sistem klasikal (*On Campus*) dan non klasikal (*Off Campus*). Tahap 1 adalah tahap Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS yang dilaksanakan secara "*On Campus*" selama 13 hari untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II dan 18 hari untuk Diklat Prajabatan Golongan III. Tahap 2 adalah tahap Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS yang dilaksanakan secara "*Off Campus*" selama 14 hari kerja untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II serta 13 hari kerja untuk Diklat Prajabatan Golongan III di tempat kerja asal/tempat magang. Diklat Prajabatan Golongan I dan II dilaksanakan selama 27 hari dan Golongan III selama 31 hari.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi dan seminar. Pada tahun 2015 Pusdiklat BPS melaksanakan Diklat Prajabatan Golongan I dan II sebanyak 5 angkatan yaitu Angkatan 60 sampai dengan 64 dengan peserta sebanyak 130 orang, dan untuk Diklat Prajabatan Golongan III dilaksanakan sebanyak 25 angkatan yaitu Angkatan 77 sampai dengan 101 dengan peserta sebanyak 807 orang.

Diklat Prajabatan Golongan I dan II sebanyak 130 orang dan Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 121 orang merupakan Diklat kerjasama antara Pusdiklat BPS dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) yang pengelolaan anggarannya bersumber dari PNPB.

b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bertujuan membentuk moral, kompetensi, dan sikap PNS untuk menduduki jabatan eselon tertentu. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 2. Peserta Diklatpim Tingkat III Angkatan ke-32 BPS Tahun 2015 Bersama pimpinan BPS RI dan LAN RI

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (*andragogi*). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dan Pim Tingkat III mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistem “*On Campus* dan *Off Campus*”. Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara “*On Campus*” selama 13 hari untuk Diklatpim IV dan 9 hari untuk Diklatpim III. Tahap 2 adalah tahap “*Taking Ownership*” atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara “*Off Campus*” selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 17 hari untuk Diklatpim IV dan untuk Diklatpim III selama 15 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory* atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan untuk kedua Diklatpim masing-masing selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara “*On Campus*” di Pusdiklat atau di Ibukota Provinsi asal peserta. BPS bekerja sama dengan LAN-RI pada tahun anggaran 2015, telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

sebanyak 7 angkatan yaitu Angkatan 83 sampai dengan Angkatan 89 dengan jumlah peserta sebanyak 240 orang.

Sementara itu, untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, juga menggunakan pola baru dengan mengacu pada Perka LAN nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III telah dilaksanakan sebanyak 1 angkatan yaitu Angkatan 32 dengan jumlah peserta diklat sebanyak 35 orang.

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Jarak Jauh

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan BPS adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan fungsional. Pusdiklat BPS pada tahun 2015 melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan yang terdiri dari Diklat Fungsional sebanyak 4 (empat) diklat, Diklat Teknis sebanyak 5 (lima) diklat dan Diklat bekerjasama dengan luar negeri sebanyak 1 (satu) diklat. Seluruh kegiatan dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2015. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 828 (delapan ratus dua puluh delapan) orang dimana 483 (empat ratus delapan puluh tiga) orang laki-laki dan 345 (tiga ratus empat puluh lima) orang perempuan. Penjelasan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

c.1. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Dalam rangka mendukung Visi BPS yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”, diperlukan data yang berkualitas yang dapat diakses oleh para pengguna data. Kualitas data sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan SDM pengumpul data. Untuk meningkatkan keterampilan pegawai di bidang statistik, Pusdiklat BPS melaksanakan diklat fungsional statistisi baik yang dilakukan secara konvensional di dalam kelas maupun dengan cara diklat jarak jauh. Diklat fungsional statistisi jarak jauh dirasakan sangat efektif dan efisien, karena peserta belajar secara mandiri menggunakan modul yang telah disediakan.

Diklat fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai BPS baik pusat maupun daerah dan

pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan lainnya yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli.

Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 29 April 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas laki-laki 15 (lima belas) orang, dan perempuan 10 (sepuluh) orang. Ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Provinsi dan sisanya 2 (dua) orang peserta non BPS.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta secara 100 persen dinyatakan lulus dan menerima sertifikat lulus diklat.



Gambar 3. Peserta Diklat Fungsional Statistisi Ahli Angkatan ke-15 BPS Tahun 2015

c. 2. Diklat Rancang Bangun Kurikulum BPS

Diklat Rancang Bangun Kurikulum adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada para peserta sehingga dapat mengaplikasikan secara langsung teknik penyusunan kurikulum diklat di lingkungan Pusdiklat BPS. Peserta yang ikut dalam kepersertaan diklat adalah pegawai yang bekerja di Pusdiklat serta yang menduduki jabatan fungsional widyaiswara.

Diklat dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 April 2015, dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh orang) orang. Peserta terdiri atas 11 (sebelas) orang laki-laki, dan 9 (sembilan) orang perempuan. Seluruh peserta berasal dari BPS. Pengajar diklat berasal dari widiyaswara Lembaga Administrasi Negara yang berkompeten dibidang masing-masing. Menurut hasil evaluasi belajar, ada 1 orang dinyatakan tidak lulus, dikarenakan tidak memenuhi syarat kehadiran, sehingga tingkat kelulusan sebesar 95 persen.



Gambar 4. Kegiatan Belajar Mengajar Peserta Diklat Rancang Bangun Kurikulum BPS Tahun 2015

c. 3. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

Selain diklat fungsional statistisi, Pusdiklat BPS pada tahun 2015 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer. Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Tingkat Ahli.

Adapun pelaksanaan diklat pada tanggal 13 Oktober s.d 12 November 2015. Jumlah peserta ada sebanyak 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas 15 (lima belas) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Umumnya peserta berasal dari non BPS, yaitu ada sebanyak 12 (dua belas) orang dan 5 (lima) orang berasal dari BPS. Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten dibidang komputer. Dengan tingkat kelulusan sebesar 100 persen.



Gambar 5. Peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Angkatan ke-11 BPS Tahun 2015

c.4. *The Second Regional Course on Sampling Methods for Produce Core Data Items Agricultural and Rural Statistics*, kerjasama BPS dan UNSIAP

The Second Regional Course on Sampling Methods for Produce Core Data Items Agricultural and Rural Statistics training merupakan satu-satunya diklat yang diselenggarakan hasil kerja sama BPS dengan UNSIAP. Pelatihan ini bertujuan untuk menguji set minimal data inti statistik pertanian dan pedesaan dalam konteks penerapan metode sampling untuk pengumpulan data dan produksi statistik dan indikatornya; dan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang survei sampel untuk produksi statistik pertanian dan pedesaan.

Sasaran pelatihan ini adalah Perwakilan kantor statistik nasional dan unit statistik kementerian yang terlibat dalam produksi statistik pertanian dan pedesaan di Negara prioritas Rencana Regional Asia-Pasifik.



Gambar 6. Peserta *Regional Course* Tahun 2015 Bersama Pengajar dan Pimpinan Pusdiklat BPS



Gambar 7. Kegiatan Belajar Mengajar Peserta *Regional Course* Tahun 2015

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 20 November 2015, dengan jumlah peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Peserta laki-laki sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan perempuan sebanyak 9 (sembilan)

orang. Peserta yang berasal dari luar negeri ada sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan sisanya dari Indonesia sebanyak 5 (lima) orang.

Adapun pengajar didatangkan langsung dari pengajar UNSIAP dan BPS yaitu Mr. Arman Bidarbakht Nia, Mr. Alope Kar, dari Institut Statistik untuk Asia dan Pasifik Chiba; dari Jepang Ms.Sachiko Tsuji dari FAO; dan juga Mr. Choiril Maksun dari BPS Indonesia.

c.5. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Gelombang I Kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sesuai dengan arahan pimpinan bahwa pada tahun 2016 akan ada kegiatan besar yaitu Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Kegiatan tersebut tentunya akan membutuhkan SDM panitia pengadaan terkait kelancaran kegiatan SE2016. Sejalan dengan itu, untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, pusdiklat menyelenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Gelombang I, terdiri dari 4 (empat) angkatan yaitu angkatan I s.d IV yang merupakan hasil kerja sama dengan LKPP. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika.



Gambar 8. Kegiatan Ujian Sertifikasi Secara Online Peserta Diklat Barang Jasa Gelombang I (Angkatan I s.d. IV) Tahun 2015

Kegiatan diklat diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diklat dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 27 November 2015. Diklat diikuti oleh 158 (seratus lima puluh delapan) orang, dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang dan peserta perempuan sebanyak 62 (enam puluh dua) orang. Seluruh peserta berasal dari pegawai BPS baik pusat maupun daerah.

Pengajar diklat berasal dari berbagai instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat mengajar dari LKPP. Selain kegiatan belajar-mengajar, diklat ini juga menyelenggarakan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara online di laboratorium komputer pusdiklat lantai 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan sebesar 51,47 persen, ada sebanyak 66 (enam puluh enam) orang dari peserta yang mengikuti ujian tidak lulus. Berikut foto pelaksanaan ujian sertifikasi secara online.

c.6. Diklat Simpeg Online

Diklat teknis Simpeg *Online* adalah diklat yang digagas oleh Biro Kepegawaian BPS. Diklat ini hasil kerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Biro SIS. Adapun tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi operator SIMPEG BPS Pusat dan Daerah dalam pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian secara *online*. Sasaran diklat ini adalah perwakilan dari masing-masing BPS Provinsi Bagian Kepegawaian yang akan bertindak sebagai editor dan validator data Simpeg *Online* BPS.



Gambar 9. Acara Pembukaan Peserta Diklat Simpeg On-Line Tahun 2015

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d 1 Desember 2015, yang merupakan diklat paling singkat di tahun 2015. Diklat diikuti oleh 47 (empat puluh tujuh) orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan 30 (tiga puluh) orang perempuan. Tenaga pengajar diklat ini ada sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang dari Biro Kepegawaian BPS dan 2 (dua) orang dari Direktorat SIS BPS.

c.6. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Gelombang II Kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Peminatan calon peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gelombang I sangat banyak, sehingga Pusdiklat menyelenggarakan kembali Diklat tersebut. Pada gelombang ke-2 ini ada 4 kelas angkatan yaitu angkatan V s.d VIII dengan jumlah peserta rata-rata tiap kelas 50 orang, sehingga total peserta diklat ini ada sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang. Diklat dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 18 Desember 2015.



Gambar 10. Acara Pembukaan Peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gelombang II (Angkatan V s.d. VIII) Tahun 2015

Berdasarkan hasil ujian sertifikasi *online*, tingkat kelulusan tidak berbeda jauh dengan gelombang sebelumnya yaitu sebesar 51,81 persen, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang tidak lulus.

c.7. Diklat Teknis Infografis

Diklat teknis lain yang diselenggarakan oleh pusdiklat di penghujung tahun adalah Diklat Teknis Infografis. Diklat ini merupakan kerjasama dengan CV Kreasi Presentasi Surabaya dan Direktorat Diseminasi Statistik. Tujuan diklat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan desiminasi dan layanan statistik secara visual agar lebih menarik dan mudah dipahami bagi konsumen data. Diklat diikuti oleh perwakilan dari masing-masing BPS Provinsi Bidang IPDS yang akan bertindak sebagai editor dan creator infografis dari publikasi-publikasi BPS.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Desember 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. Jumlah peserta laki-laki ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan perempuan 21 (dua puluh satu) orang. Seluruh peserta diklat berasal dari BPS. Diklat diajar oleh Tim Kreasi Presentasi serta dari tim Direktorat Diseminasi Statistik.



Gambar 11. Acara Pembukaan Peserta Diklat Teknis Infografis Tahun 2015

c.8. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Jarak Jauh Tahun 2014-2015

Pusdiklat BPS selain menyelenggarakan diklat fungsional statistisi secara klasikal (tatap muka), juga menyelenggarakan diklat fungsional statistisi yang diselenggarakan secara jarak jauh. Proses belajar mengajar

disampaikan melalui media internet (*online*). Proses belajar dilakukan pada tahun 2014 dan di tahun 2015 merupakan kegiatan evaluasi ujian diklat. Adapun tujuan umum dari diklat ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi tingkat ahli yang disampaikan melalui pembelajaran Jarak Jauh dengan *e-learning*. Dengan sasaran diklat adalah Pegawai yang berasal dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli.

Diklat ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 s.d Desember 2015, yang bertempat di masing-masing unit kerja peserta (*online*). Diklat ini diikuti oleh 211 (dua ratus sebelas) orang, dengan jumlah peserta laki-laki 119 (seratus sembilan belas) orang dan perempuan 92 (sembilan puluh dua) orang. Seluruh peserta berasal dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota. Pengajar dalam diklat ini berasal dari Widyaiswara Pusdiklat BPS yang berkompeten dibidang masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi ujian dan tugas akhir diklat, tingkat kelulusan diklat sebanyak 79,47 persen, yaitu 151 (seratus lima puluh satu) orang lulus dan 39 (tiga puluh sembilan) orang tidak lulus. Karena kegiatan ini dilakukan di daerah masing-masing peserta, tidak ada foto dokumentasi kegiatan belajar mengajar pada diklat ini.

c.8. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Terampil Jarak Jauh Tahun 2014

Sama halnya dengan diklat fungsional statistisi jarak jauh sebelumnya, selain tingkat ahli, pusdiklat juga menyelenggarakan diklat fungsional statistisi pada tingkat terampil. Tujuan dari diklat ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi tingkat terampil yang disampaikan melalui pembelajaran Jarak Jauh dengan *e-learning*.

Sasaran diklat ini adalah pegawai yang berasal dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Diklat ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 s.d Desember 2015. Ada sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang peserta, yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang laki-laki dan 31 (tiga puluh satu) orang perempuan. Seluruh peserta berasal dari BPS. Berdasarkan hasil evaluasi ujian dan tugas akhir diklat tingkat kelulusan sebesar 95,65 persen,

yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) orang lulus dan 3 (tiga) orang tidak lulus.

Berdasarkan uraian kegiatan diklat yang dilaksanakan Pusdiklat BPS pada tahun 2015, dari 33 kelas yang ditargetkan bertambah menjadi sebanyak 41 kelas yang terealisasi. Dengan demikian tingkat pencapaian kinerja pada indikator penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 120 persen seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6. Pencapaian kinerja yang melebihi target tersebut dikarenakan adanya tambahan diklat teknis sehingga mengakibatkan bertambahnya kelas pada bidang diklat teknis dan fungsional dari 4 kelas menjadi 12 kelas.

Pada awal tahun anggaran, diklat fungsional yang akan diselenggarakan adalah diklat fungsional statistisi ahli, diklat fungsional pranata komputer ahli, dan diklat fungsional pranata komputer terampil. Namun seiring berjalannya waktu, diklat fungsional pranata komputer terampil tidak dapat diadakan karena calon peserta kurang dari kuota minimal kelas (minimal peserta 20 orang/kelas). Sebagai pengganti diklat tersebut adalah beberapa diklat teknis (diklat rancang bangun kurikulum, UNSIAP, pengadaan barang dan jasa, simpeg *online*, dan teknis infografis). Penambahan beberapa diklat teknis tersebut juga karena untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidangnya untuk kepentingan BPS dan adanya optimalisasi anggaran.

A.2. Indikator 2 : Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang Lulus dengan Kategori Memuaskan

Selama diklat berlangsung, penyelenggara melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta yang mencakup aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Klasifikasi peserta berdasarkan predikat kelulusan adalah sangat memuaskan dengan nilai >92,5; memuaskan dengan nilai 85-92,5; cukup memuaskan dengan nilai 77,5-85; kurang memuaskan dengan nilai 70-77,5; dan tidak memuaskan dengan nilai < 70.

Berdasarkan pencapaian nilai peserta, tingkat capaian kinerja pada indikator persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 107,56 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 96,80

persen dibandingkan target PK 2015 sebesar 90 persen. Hal ini menunjukkan capaian yang menggembirakan dalam penyelenggaraan diklat di Pusdiklat BPS.

Bagi peserta diklat kepemimpinan III dan IV, mereka telah menyerap materi dengan baik pada saat pembelajaran di kelas (*on campus*). Dalam tahap pembelajaran merancang perubahan dan membangun tim, terdapat mata diklat merancang proyek perubahan. Peserta diklat menuangkan rancangan dan implementasi Proyek Perubahan ke dalam penulisan Kertas Kerja Proyek Perubahan (KKPP) yang kemudian diseminarkan di depan mentor (atasan langsung), narasumber, dan *coach* (pembimbing KKPP). KKPP merupakan wujud atau penguatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial peserta. Dilihat dari tingkat capaian yang memuaskan, membuktikan bahwa peserta telah mampu menuangkan kompetensi dari hasil belajar yang diperoleh dan berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal peserta diklat yaitu mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP).

Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah menyerap materi dengan baik pada saat pembelajaran di kelas (*on campus*). Dalam tahap pembelajaran terdapat mata diklat aktualisasi diklat prajabatan. Mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS. Peserta diminta untuk menyajikan aktualisasi dalam bentuk penulisan kertas kerja, pembelajaran berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*), dan presentasi yang bersifat mandiri. Berdasarkan tingkat capaian yang memuaskan, membuktikan bahwa peserta telah mampu mengerjakan Kertas Kerja Proyek Perubahan (KKPP) meskipun mereka juga melaksanakan kegiatan rutin di tempat tugas. Selain itu peserta telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing.

A.3. Indikator 3 : Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Kategori Baik

Pada diklat teknis dan fungsional, penentuan kelulusan peserta dilakukan melalui beberapa kategori yaitu kategori sangat memuaskan, baik

sekali, dan baik. Unsur-unsur yang menjadi penilaian kelulusan peserta diklat teknis dan fungsional mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penguasaan materi yang dilihat berdasarkan nilai ujian tertulis dan praktikum
2. Penyusunan kertas kerja kelompok
3. Nilai-nilai etika PNS seperti disiplin, prakarsa, dan kerja sama kelompok selama kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh nilai kelulusan peserta yang minimal berkategori baik. Hasil capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik adalah sebesar 111,11 persen. Dilihat dari perbandingan antara realisasi sebesar 100 persen terhadap target PK 2015 sebesar 90 persen, capaian kinerja telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan dengan baik. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari *performance* (penampilan, teknik mengajar, dan buku modul yang menunjang) para pengajar/widyaiswara yang telah memberikan materi dengan baik sehingga dapat diserap oleh seluruh peserta diklat.

A.4. Indikator 4 : Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara penyelenggara, peserta diklat, dan pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sampai dimana tingkat pelayanan penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar. Penyelenggaraan diklat yang dievaluasi meliputi fasilitas akomodasi, konsumsi, dan penyelenggara. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran/tujuan terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi terhadap target PK 2015. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 97,72 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 87,95 persen dibandingkan target PK 2015 sebesar 90 persen. Tingkat capaian yang diperoleh ternyata kurang dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut kurang dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab indikator kepuasan peserta kurang dari target yang ditetapkan adalah berkaitan dengan konsumsi. Peserta diberikan makan 3 kali yaitu makan pagi, siang, dan malam, serta snack 2 kali pada saat istirahat pagi dan sore. Pada umumnya peserta mengikuti diklat untuk waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 1 (satu) minggu, terutama yang mengikuti diklat prajabatan dan diklatpim. Oleh karena itu, peserta mengharapkan bahwa menu makanan yang disajikan lebih bervariasi agar tidak terjadi kebosanan. Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah jasa katering yang bekerja sama dengan Pusdiklat BPS berdasarkan penunjukan langsung atau pelelangan. Pada awal kerja sama perlu ditetapkan menu harian yang akan disajikan untuk peserta diklat mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan diklat.

Untuk evaluasi penyelenggaraan sudah ke arah lebih baik, terutama pada diklat prajabatan dan diklatpim. Dengan adanya pelaksanaan diklat melalui pola baru, peserta merasa lebih menyukai pola baru tersebut karena materi yang dipelajari dapat diaplikasikan langsung di tempat tugas masing-masing. Untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan

gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, pada tahun anggaran 2015 Pusdiklat BPS mengadakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

A.5. Indikator 5 : Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan S3 diproses oleh Pusdiklat dengan mendapat rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.

1. Persyaratan Izin Belajar

Bagi Pegawai yang ingin menempuh pendidikan melalui jalur IB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang akan mengajukan IB sudah berstatus PNS.
- b. Surat permohonan IB diajukan sebelum melakukan proses pendaftaran di Universitas/Perguruan Tinggi (Univ/PT) yang dituju.
- c. Dalam rangka pemanfaatan pendidikan yang ditempuh dan pemenuhan kebutuhan SDM yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPS, maka program studi/jurusan yang diikuti oleh calon IB harus sesuai dengan

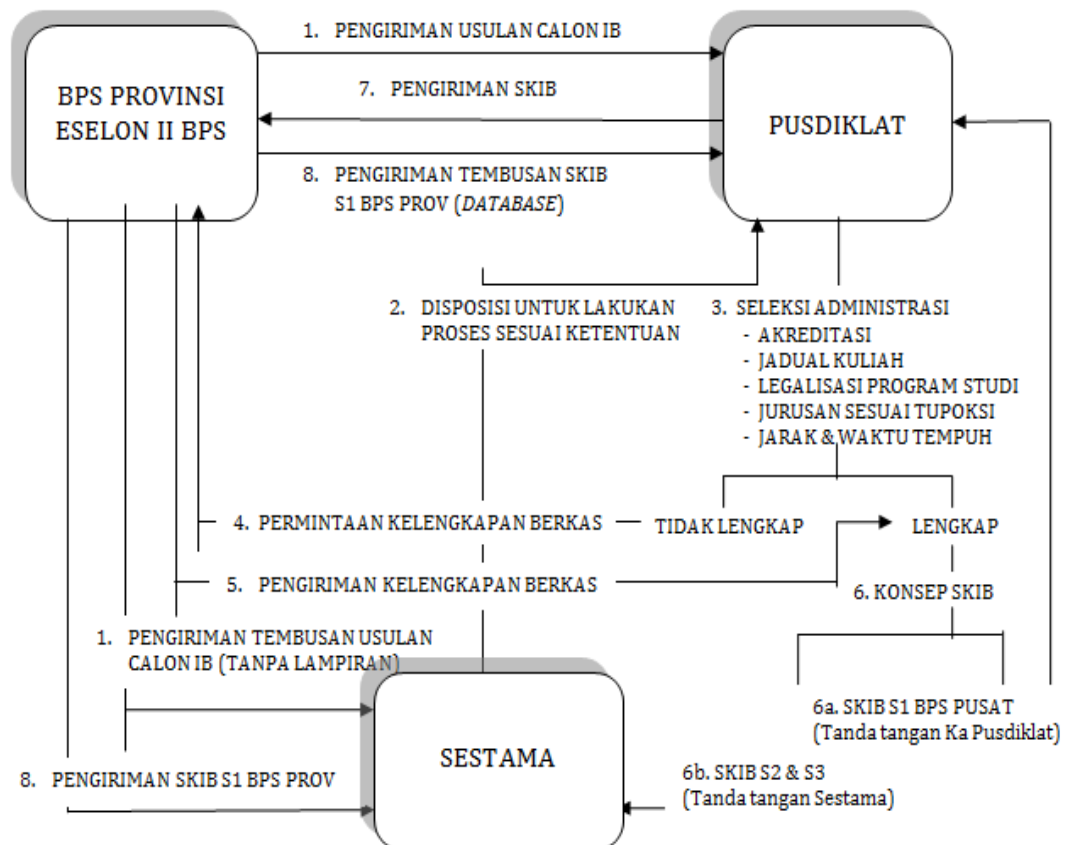
- kebutuhan organisasi (Perka 48/2012 Pasal 2 ayat 1b).
- d. Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang melaksanakan IB, maka program studi yang dipilih pada Univ/PT swasta yang dituju minimal berakreditasi B dan telah memiliki izin operasional program studi (sesuai Perka No. 48 Tahun 2012 Bab III Pasal 6 Ayat 1b).
 - e. Program pendidikan yang diikuti bukan kelas Sabtu-Minggu atau model Kelas Jauh.
 - f. Untuk kelancaran studi dan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari, maka program pendidikan harus berlangsung di luar jam kerja dan diharapkan lebih mengutamakan kepentingan kedinasan dan tugas kantor sehari-hari;
 - g. Pemilihan lokasi pendidikan yang terdekat dengan tempat kerja PNS, sehingga jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan. Diperkirakan jarak tempuh dari kantor ke tempat kuliah maksimal 60 km atau dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 (satu) jam.
 - h. Setiap butir DP-3/PPK pada tahun terakhir bernilai minimal baik.

2. Tata cara Izin Belajar:

Tata cara pendaftaran bagi PNS yang ingin mengikuti IB adalah sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan surat permohonan IB kepada atasan setingkat Eselon II di unit kerjanya;
- b. Setelah mendapat persetujuan dari atasan unit kerja, PNS menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang diperlukan dan menandatangani surat pernyataan IB di atas meterai yang diketahui oleh Pejabat Eselon III untuk S1 dan Eselon II untuk S2;
- c. Pejabat Eselon II mengirimkan surat usulan/pengantar calon IB kepada Kepala Pusdiklat BPS u.p. Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat BPS;
- d. Berkas persyaratan yang disertakan sebagai lampiran adalah sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Izin Belajar;

- Surat Keterangan Uraian Tugas Kerja dari Pejabat Eselon II;
- Salinan Keputusan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Univ/PT yang dituju;
- Surat izin operasional/perpanjangan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilegalisir Univ/PT;
- Surat keterangan jadwal kuliah yang dilegalisir atau berupa leaflet/brosur yang dikeluarkan oleh Univ/PT yang dituju;
- Surat keterangan jarak dan waktu tempuh dari kantor ke tempat kuliah yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setempat;



Gambar 12. Diagram Alir Seleksi Pegawai Izin Belajar

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang uraian tugas BPS disebutkan bahwa Pusediklat BPS melakukan seleksi

administratif terhadap pegawai BPS yang mengajukan izin belajar dan membuat surat izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan seleksi administrasi calon IB tersebut dapat dilihat pada Diagram Alir Seleksi Peserta IB di atas.

Berdasarkan diagram alir seleksi izin belajar, bagi calon IB yang berkasnya telah memenuhi persyaratan akan dibuatkan Surat Izin Belajar yang selanjutnya ditandatangani Sestama. Penyelesaian surat izin belajar menjadi salah satu indikator capaian kinerja dalam rangka terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk surat izin belajar yang diselesaikan pada tahun 2015 sesuai dengan target PK 2015 yaitu 100 persen.

Capaian kinerja yang sesuai harapan tersebut menunjukkan kinerja Pusdiklat BPS yang cukup berhasil dalam mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.

A.6. Indikator 6 : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS

Selain mengelola izin belajar, Pusdiklat BPS mempunyai tugas menyelenggarakan program Tugas Belajar (TB). Program tersebut dilakukan Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik ke dalam maupun ke luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3, sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (*short course* dan *post doctoral*). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari:

1. Beasiswa APBN BPS

Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, dan ITS.

2. Beasiswa APBN Non BPS

Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun *Double Degree* dan S3.

3. Beasiswa Non APBN
Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan ADS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.
4. Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa. Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB).

Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) dilakukan terlebih dahulu membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Universitas/Perguruan Tinggi (Univ/PT) di awal kerjasama, yang dilanjutkan dengan membuat Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa baru. Pusdiklat juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugasbelajarkan.

1. Persyaratan Tugas Belajar

Bagi PNS yang ingin menempuh pendidikan melalui jalur TB harus memenuhi persyaratan-persyaratan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPS No. 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik) sebagai berikut:

1.1. Persyaratan Umum:

1. Membuat pernyataan tidak sedang menjalani TB atau IB;
2. Program studi sesuai kebutuhan organisasi;
3. Masa kerja 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai pegawai;
4. Telah bekerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung sejak aktif bekerja setelah tugas belajar sebelumnya, dibuktikan dengan SK Aktif kembali (kecuali lulus dengan predikat *Cum Laude*);
5. Telah disetujui atau direkomendasi oleh atasan setingkat Eselon II;
6. Setiap butir DP-3/PPK tahun terakhir bernilai minimal baik;

7. Lulus tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademis PT yang dituju.

1.2. Persyaratan Khusus (untuk program beasiswa APBN BPS):

Untuk Program S2

1. Pendidikan terakhir D4 STIS/S1
2. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
3. Memiliki nilai TOEFL yang masih berlaku pada tahun seleksi minimal 450 (prediksi/institusional)
4. Usia maksimal : 37 tahun

Untuk Program S3

1. Pendidikan terakhir S2
2. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00
3. Memiliki nilai TOEFL yang masih berlaku pada tahun seleksi minimal 450
4. Usia maksimal : 40 tahun
5. Membuat proposal riset

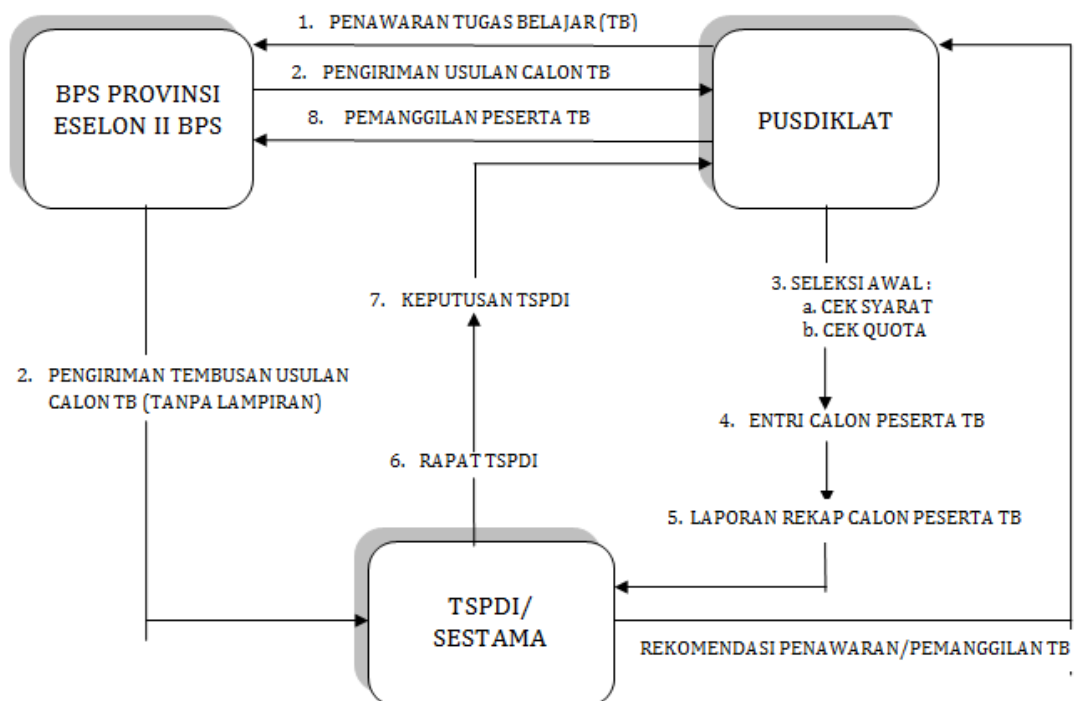
2. Tata Cara Tugas Belajar :

Tata cara pendaftaran bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai peserta TB adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran beasiswa S2 atau S3 dapat diketahui melalui surat pemberitahuan/penawaran yang dikirimkan Pusdiklat BPS kepada Pejabat Eselon II atau dapat juga dilihat melalui *website* <http://pusdiklat.bps.go.id>;
- b. PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan surat pemberitahuan beasiswa mengisi formulir penerimaan beasiswa dan mengirimkannya ke Pusdiklat BPS;
- c. Kelengkapan berkas asli dan dokumen pendukung lainnya dikirimkan bersama Surat Usulan dari Atasan setingkat Eselon II kepada Sestama/Ketua Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) melalui Pusdiklat BPS;

- d. Berdasarkan hasil seleksi administrasi oleh Pusdiklat dan pemilihan oleh TSPDI BPS, PNS calon peserta TB yang terpilih akan dihubungi oleh Pusdiklat dan diumumkan melalui surat yang ditujukan kepada Eselon II BPS Pusat dan BPS Provinsi, sekaligus pemberitahuan untuk mengikuti tes seleksi akademis Univ/PT yang dituju;
- e. Seleksi akademis dilakukan di Univ/PT yang dituju terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bahasa Inggris/TOEFL, dan wawancara;
- f. Setelah dinyatakan lolos tes seleksi akademis, peserta TB terpilih diterima di Univ/PT yang dituju dan harus menandatangani SPTB yang dikeluarkan Pusdiklat;
- g. Pusdiklat juga mengirimkan fotocopy SPTB kepada Biro Kepegawaian untuk keperluan pembuatan SKTB.

Tahapan seleksi administrasi dan pemilihan calon TB dapat dilihat pada Diagram Alir Seleksi Peserta Tugas Belajar di bawah ini.



Gambar 13. Diagram Alir Seleksi Pegawai Tugas Belajar

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tugas Belajar

1. Pusdiklat melakukan evaluasi pada Univ/PT yang melakukan kerjasama dengan BPS tentang proses belajar dan laporan akademik para peserta TB. Laporan akademik yang dilaporkan Univ/PT berupa absensi dan nilai IPK peserta TB;
2. Pusdiklat juga melakukan monitoring dan evaluasi pada para peserta TB baik yang kuliah di dalam negeri maupun luar negeri, dengan menerima laporan akademik tiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester. Hasil laporan evaluasi TB dari Univ/PT dan laporan dari masing-masing peserta TB dibuat ringkasannya oleh Pusdiklat dan dilaporkan kepada Sestama;
3. Monitoring juga dilakukan pada peserta TB yang telah menyelesaikan pendidikannya. Pusdiklat BPS akan menerima laporan selesai TB disertai dengan lampiran thesis/disertasi, Ijazah dan Transkrip nilai yang ASLI. Karena biasanya perlu waktu cukup lama untuk keluarnya ijazah dan transkrip nilai, maka dapat diganti sementara dengan Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL);
4. Berdasarkan laporan selesai TB, Pusdiklat mengirim surat pemberitahuan kepada Biro Kepegawaian agar yang bersangkutan dapat dibuatkan SK Aktif bekerja kembali. Biro Kepegawaian akan membuat SK Aktif dan mengirimkan SK Aktif ASLI kepada yang bersangkutan yang ditembuskan ke Pusdiklat BPS dan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pusdiklat BPS akan ditindaklanjuti dengan adanya sanksi/teguran terhadap peserta TB yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS pada tahun 2015 adalah sebanyak 242 orang. Mereka tersebar di beberapa perguruan

tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika. Realisasi jumlah pegawai yang mengikuti TB tersebut sama dengan jumlah target pada PK 2015 yaitu 242 orang. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator di atas menunjukkan bahwa peserta TB pada tahun 2015 tidak ada yang mengundurkan diri atau *drop out* sehingga perkuliahan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusdiklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

B. Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM pegawai BPS, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan akuntabilitas kinerja yang transparan. Pengelolaan aset BMN yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan merupakan sasaran kedua dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun

2015. Kedua unsur tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan.

Indikator : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dimana masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Strategis
 - 1). Pemenuhan Renstra
 - 2). Kualitas Renstra

- 3). Implementasi Renstra
 - a. Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pemenuhan Pengukuran
 - b. Kualitas Pengukuran
 - c. Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Pemenuhan Pelaporan
 - b. Kualitas Informasi Kinerja
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
 - a. Kinerja Yang Dilaporkan (Output)
 - b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Terhadap Target PK 2015 Pusdiklat BPS Tahun 2015

No	Sasaran/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	58,54	87,37

Pada tahun 2015, hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat adalah sebesar 58,54 poin sedangkan target PK 2015 adalah sebesar 67

point. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 87,37 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang diharapkan (lihat Tabel 7). Beberapa faktor yang menjadi penyebab/kendala belum terpenuhinya target capaian kinerja adalah adanya beberapa indikator yang belum memenuhi target yang diharapkan dan target belum memenuhi standar SMART yang efisien dan efektif. Selain itu, pada saat penilaian oleh Inspektorat masih terdapat kekurangan dokumen-dokumen pendukung yang akan direviu.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu lebih diperhatikan dokumen-dokumen pendukung sebagai penunjang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja yang diharapkan.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 Terhadap Tahun 2010-2014

Selama kurun waktu 2010-2014 Renstra Pusdiklat BPS masih menyatu dengan Renstra BPS karena masih berada di bawah Sekretaris Utama BPS. Pada tahun 2014, Pusdiklat BPS telah menjadi salah satu satuan kerja (satker) BPS. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sasaran dan indikator kinerja tidak dapat diperbandingkan perkembangannya selama kurun waktu tersebut. Meskipun demikian, untuk tahun 2014 dapat dilihat capaian rata-rata dibandingkan tahun 2015 sehingga pada Laporan Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2015 ini akan dilihat perkembangan capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2014-2015.

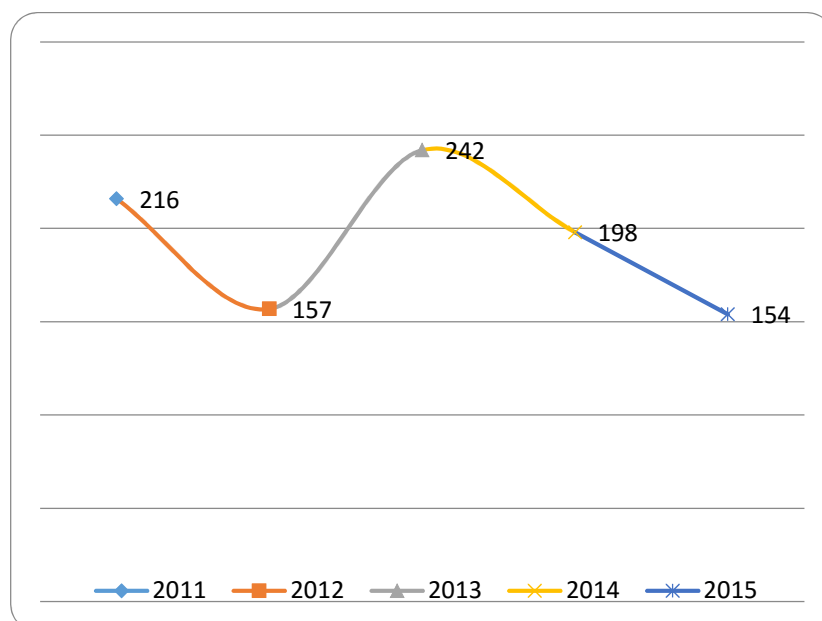
3.2.1 Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 2014-2015

Pada tahun 2014, Pusdiklat BPS memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Terwujudnya Layanan Tata Usaha Pusdiklat BPS, Terwujudnya Layanan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Terwujudnya Layanan Diklat Teknis dan Fungsional. Sementara itu, pada tahun 2015 hanya 2 (dua) sasaran strategis yaitu Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan serta Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan. Dengan adanya perbedaan sasaran tersebut maka masing-masing

indikator tidak dapat diperbandingkan. Perbandingannya dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja seluruh indikator masing-masing sasaran strategis. Bila dilihat perkembangannya dibandingkan tahun 2014, rata-rata capaian kinerja Pusdiklat BPS secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu dari 97,64 persen menjadi 103,39 persen.

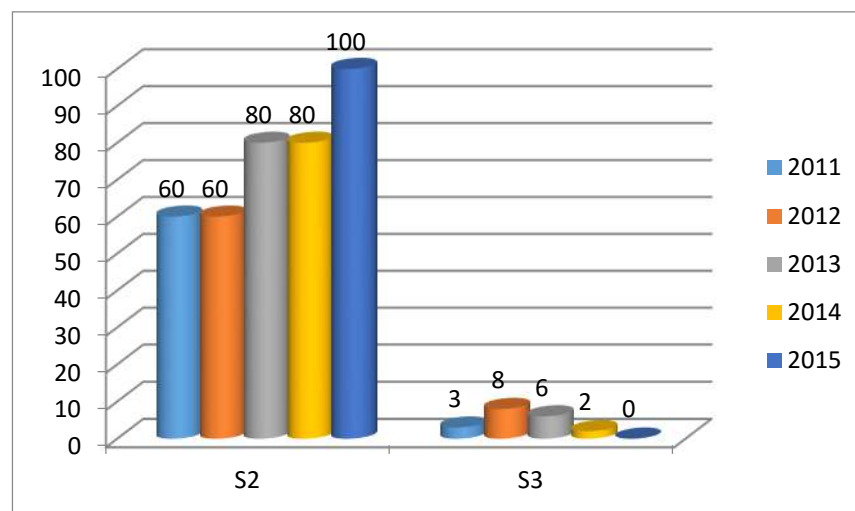
3.2.2 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator 2014-2015

Indikator yang terdapat pada sasaran pertama tahun 2015 yaitu terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan tidak seluruhnya dapat dibandingkan dengan indikator pada tahun 2014. Pada tahun 2014, sasaran pertama yaitu terwujudnya layanan tata usaha Pusdiklat BPS terdiri dari 5 (lima) indikator yang diantaranya adalah indikator pertama: jumlah surat izin belajar yang diselesaikan. Bila dilihat capaian kinerjanya melebihi target yaitu sebesar 115 persen, sedangkan pada tahun 2015, indikatornya adalah persentase surat izin belajar yang diselesaikan sebesar 100 persen. Untuk jumlah surat izin belajar tidak dapat diprediksi secara tepat setiap tahunnya karena tergantung dari banyaknya pegawai yang mengajukan usulan izin belajar. Seperti gambar di bawah ini bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 perkembangan jumlah izin belajar cenderung berfluktuasi.



Gambar 14. Grafik Jumlah Izin Belajar S2 dan S3 Tahun 2011-2015

Selain itu, indikator yang juga dapat dibandingkan perkembangannya adalah indikator kedua pada sasaran pertama Laporan Kinerja tahun 2014 dan sasaran pertama pada indikator keenam Laporan Kinerja tahun 2015 yaitu jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS memiliki capaian kinerja masing-masing sebesar 100 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun setiap tahun memiliki jumlah yang berbeda-beda, namun realisasi pegawai yang mengikuti Tugas Belajar sudah sesuai dengan yang ditargetkan.



Gambar 15. Grafik Jumlah Tugas Belajar S2 dan S3 Tahun 2011-2015

3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 Terhadap Target Renstra 2015-2019

Renstra Pusdiklat BPS tahun 2015-2019 sudah memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang sesuai dengan di Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS tahun 2015. Target PK 2015 merupakan implementasi dari Renstra 2015-2019 sehingga dapat dikatakan bahwa target PK 2015 sama dengan target Renstra 2015. Oleh karena itu, capaian kinerja yang diperoleh antara perbandingan realisasi terhadap target Renstra 2015 sejalan dengan perbandingan realisasi terhadap target PK 2015.

Sasaran pertama yang tertuang dalam Renstra 2015 adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8, sasaran tersebut diuraikan dalam 6 (enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target yaitu indikator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian kinerja

120 persen, Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 107,56 persen, dan capaian kinerja dari Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik sebesar 111,11 persen. Dua indikator sesuai dengan target masing-masing 100 persen yaitu indikator Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS, dan terdapat 1 (satu) indikator yang kurang dari target yang ditetapkan.

Tabel 8. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Target Renstra 2015 Pusdiklat BPS, Tahun 2015

No	Sasaran/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33	41	120,00
		Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	96,80%	107,56
		Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	100%	111,11
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	87,95%	97,72
		Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100,00
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	242	100,00

Sasaran kedua yang tertuang dalam Renstra 2015 adalah Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan dengan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tingkat capaian kinerja yang diperoleh kurang memuaskan bila dibandingkan dengan target Renstra 2015 yaitu sebesar 87,37 persen. Angka tersebut sama dengan capaian kinerja yang diperoleh bila dibandingkan dengan target PK 2015.

Tabel 9. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Terhadap Target Renstra 2015 Pusdiklat BPS, Tahun 2015

No	Sasaran/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	58,54	87,37

3.4. Prestasi Yang Dicapai Tahun 2015

Pusdiklat BPS pada tahun 2015 belum mendapatkan prestasi atau penghargaan yang diperoleh dengan standar nasional. Pada saat ini sedang melakukan proses akreditasi baik untuk diklat teknis maupun diklat prajabatan dan kepemimpinan.

3.5. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2015

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2015 adalah Diklat Prajabatan Golongan III. Diklat tersebut diadakan untuk calon pegawai lulusan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) tahun 2013 dan lulusan STIS tahun 2014. Hal ini dilakukan sekaligus karena

lulusan STIS tahun 2013 baru memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) bersamaan dengan lulusan STIS tahun 2014 sehingga agar tidak melebihi batas maksimal penyelenggaraan prajabatan bagi calon pegawai tersebut segera diadakan kegiatan diklat prajabatan bagi mereka pada tahun 2015 awal.

Kegiatan prioritas lainnya adalah diklat teknis yaitu penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait kelancaran kegiatan besar BPS yaitu Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Untuk menampung banyaknya peserta kegiatan tersebut, kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa diadakan sampai dua gelombang.

3.6. Upaya Efisiensi Di Pusdiklat BPS Tahun 2015

Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan diklat, Pusdiklat BPS berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah seminar evaluasi pada diklat prajabatan dan kepemimpinan. Untuk menghemat anggaran perjalanan maka lokasi seminar diadakan di daerah masing-masing peserta (setiap daerah terdiri dari 10 peserta diklat), kecuali peserta dari BPS Pusat dan sekitarnya diadakan di Pusdiklat BPS. Untuk optimalisasi anggaran digunakan untuk kegiatan diklat lain terutama diklat teknis yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja dan kualitas pegawai BPS.

Upaya efisiensi lainnya dilakukan dalam rangka memenuhi belanja barang persediaan yang tepat waktu pada tahun 2016 maka pada tahun 2015 diadakan pengadaan ARK untuk keperluan sehari-hari asrama, buku modul diklat Prajabatan Gol III Reguler, perlengkapan diklat berupa tas, computer supplies, dan ATK diklat. Upaya tersebut juga dilakukan untuk efisiensi anggaran tahun 2016, mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena adanya perubahan jumlah hari diklat pada Diklatpim IV dan III yang akan diterapkan pada tahun 2016 dari 30 hari menjadi 33 hari mengakibatkan kekurangan anggaran di tahun 2016. Hal ini

berdasarkan Perka LAN Nomor 21 Tahun 2015 tentang rincian biaya penyelenggaraan diklat.

- b. Karena adanya penambahan jumlah Jam Pelajaran (JP) untuk pendampingan sebelum seminar masing-masing 18 JP untuk Diklatpim IV dan III mengakibatkan kekurangan anggaran di tahun 2016. Hal ini berdasarkan Perka LAN Nomor 21 Tahun 2015 tentang rincian biaya penyelenggaraan diklat.

3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2015

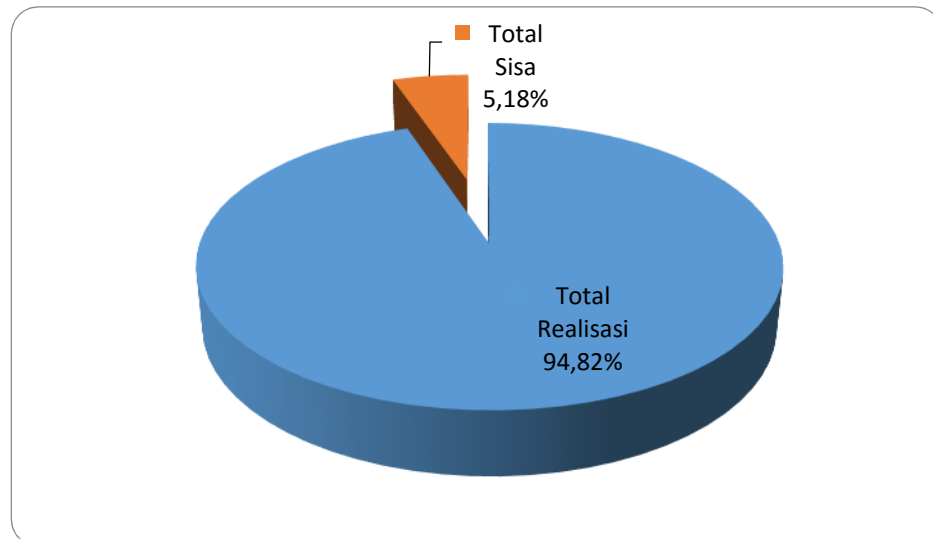
Pagu anggaran yang diberikan ke Pusdiklat BPS untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2015 adalah sebesar 48,233 milyar rupiah. Anggaran tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program yaitu : (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Total penyerapan anggaran Pusdiklat BPS dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program Pusdiklat BPS Tahun 2015

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DMPTTL	44.881.380.000	42.394.770.442	94,46
2.	PSPA	3.351.971.000	3.342.262.577	99,71
	Jumlah	48.233.351.000	45.737.033.019	94,82

Berdasarkan Tabel 10, penyerapan anggaran Pusdiklat BPS pada tahun 2015 secara keseluruhan adalah sebesar 94,82 persen dari total pagu. Bila dilihat berdasarkan program bahwa penyerapan anggaran program DMPTTL adalah sebesar 94,46 persen dari pagu anggaran program DMPTTL dan untuk penyerapan anggaran program PSPA adalah sebesar 99,71 persen

dari pagu anggaran PSPA. Sebagai gambaran realisasi dan sisa anggaran Pusdiklat BPS tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 16. Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2015

Penyelenggaraan kegiatan diklat selain bersumber dari Rupiah Murni (RM) juga bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran PNBP adalah Diklat Prajabatan Gol. III Reguler dan Gol. II Reguler kerjasama antara Pusdiklat BPS dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Sumber Biaya Pusdiklat BPS Tahun 2015

No.	Sumber Biaya	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RM	47.004.845.000	44.533.349.719	94,74
2.	PNBP	1.228.506.000	1.203.683.300	97,98
Jumlah		48.233.351.000	45.737.033.019	94,82

Penyerapan anggaran bila dilihat dari sumber biayanya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 11 nampak bahwa penyerapan anggaran RM sebesar

94,74 persen dari pagu anggaran RM dan penyerapan anggaran PNBPN adalah sebesar 97,98 persen dari pagu anggaran PNBPN.

Di sisi lain, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja per program dengan realisasi penyerapan anggaran 2015. Berdasarkan Tabel 12, rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 103,39 persen dengan penyerapan anggaran 94,82 persen. Pada program DMPTTL, capaian kinerja kegiatan layanan perkantoran sebesar 100 persen dengan penyerapan anggaran 95,89 persen dan capaian kinerja kegiatan layanan diklat aparatur BPS sebesar 120 persen dengan penyerapan anggaran 93,96 persen. Sementara itu, capaian kinerja PSPA sebesar 100 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 99,71 persen. Capaian kinerja yang dihasilkan masih lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggarannya, meskipun selisihnya relatif tidak terlalu jauh.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

No.	Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DMPTTL		
	- Layanan Perkantoran	100,00	95,89
	- Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS	120,00	93,96
2.	PSPA	100,00	99,71
	Total	103,39	94,82

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi Pusdiklat BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun anggaran. Akuntabilitas kinerja juga digunakan sebagai umpan balik bagi Pusdiklat BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

Sesuai dengan visi-nya, Pusdiklat BPS sebagai **pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah** dicerminkan dari keberhasilannya menyelenggarakan diklat prajabatan, kepemimpinan, serta diklat teknis dan fungsional, yang dapat meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam rangka mengisi kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang dimiliki aparatur negara dengan kompetensi standar yang telah ditetapkan sebagai aparatur negara pada jabatannya masing-masing.

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, Pusdiklat BPS menyusun dua sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015. Sasaran strategis yang akan dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2015 adalah (i) terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan dan (ii) terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan.

Pada tahun 2015, Pusdiklat BPS telah menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari kedua sasaran strategis yang telah ditetapkan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 103,39 persen. Sebagian besar indikator kinerja meraih tingkat pencapaian 100 persen keatas. Tingkat capaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Pusdiklat BPS.

Meskipun rata-rata capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih terdapat capaian kinerja yang belum mencapai target yaitu pada sasaran pertama indikator keempat “persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat” sebesar 97,72 persen dan pada sasaran kedua indikator “hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat” sebesar 87,37 persen. Pada masa yang akan datang diharapkan kinerja, koordinasi, dan kerjasama yang lebih optimal agar apa yang ditargetkan tercapai.

Bila dilihat perkembangan rata-rata capaian kinerja dibandingkan tahun 2014, rata-rata capaian kinerja Pusdiklat BPS secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu dari 97,64 persen menjadi 103,39 persen. Sedangkan bila dilihat perkembangan dari Renstra 2010-2014 tidak dapat diperbandingkan karena sasaran dan indikator yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Pusdiklat BPS tahun 2015 – 2019, capaian kinerja yang diperoleh antara perbandingan realisasi terhadap target Renstra 2015 sejalan dengan perbandingan realisasi terhadap target PK 2015. Renstra Pusdiklat BPS tahun 2015-2019 sudah memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang sesuai dengan di Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS tahun 2015. Target PK 2015 merupakan implementasi dari Renstra 2015-2019 sehingga dapat dikatakan bahwa target PK 2015 sama dengan target Renstra 2015.

4.2. TINDAK LANJUT

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat BPS dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga kegiatan diklat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Tuntutan diklat yang semakin beragam, terutama diklat prajabatan dan diklatpim dengan pola barunya, membuat peserta mengharapkan kepuasan dan kenyamanan yang lebih baik dalam proses pembelajaran maupun akomodasi dan konsumsi.

Sejalan dengan itu, salah satu indikator dalam Renstra 2015-2019 adalah persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Bila dilihat dari tingkat capaian kinerja dari indikator tersebut pada tahun

2015 masih dibawah target yaitu sebesar 97,72 persen. Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, salah satu yang menjadi faktor penyebab indikator kepuasan peserta kurang dari target yang ditetapkan adalah berkaitan dengan konsumsi. Peserta mengharapkan bahwa menu makanan yang disajikan lebih bervariasi agar tidak terjadi kebosanan.

Tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

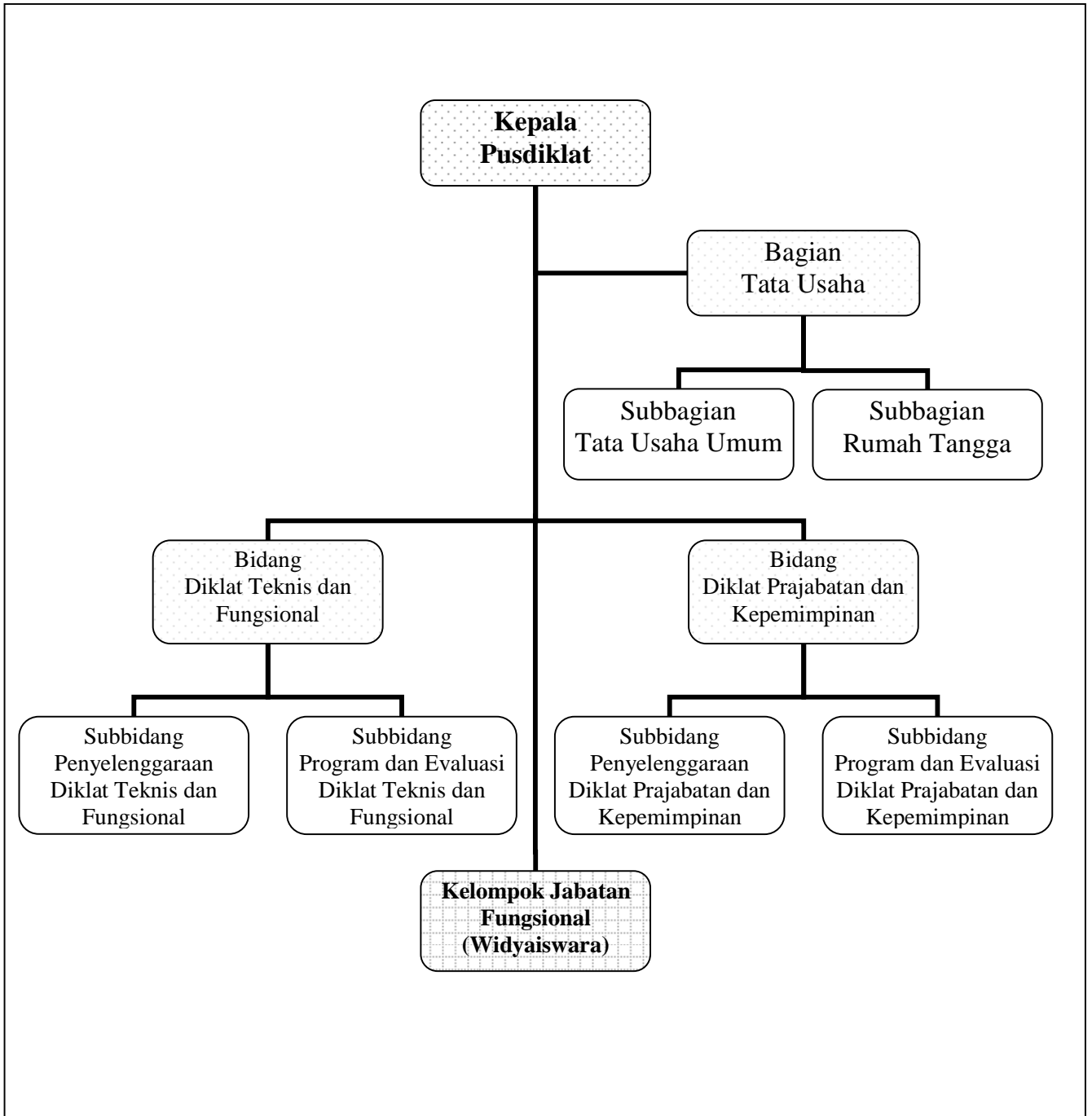
- a. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah jasa katering yang bekerja sama dengan Pusdiklat BPS. Jasa katering terkait diberikan teguran agar menu makanan yang disajikan lebih bervariasi.
- b. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, pihak jasa katering agar di awal perjanjian/kontrak memberikan menu makanan yang lengkap untuk setiap hari diklat. Menu tersebut dikaji oleh pihak Pusdiklat BPS apakah sudah sesuai dan pantas untuk disajikan bagi peserta diklat. Apabila menu yang disajikan kurang sesuai dengan menu yang diberikan pada awal perjanjian/kontrak, pihak katering akan diberikan teguran baik lisan maupun tertulis.

Indikator lain yang juga masih dibawah target adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan capaian kinerja sebesar 87,37 persen. Penyebab nilai capaian yang masih dibawah target karena adanya beberapa indikator yang belum memenuhi target yang diharapkan dan target belum memenuhi standar SMART yang efisien dan efektif. Selain itu, pada saat penilaian oleh Inspektorat masih terdapat kekurangan dokumen-dokumen pendukung yang akan direviu.

Sebagai tindak lanjut dan untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu lebih diperhatikan dokumen-dokumen pendukung sebagai penunjang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja yang diharapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS



Lampiran 2. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Instansi : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI)

Unit Eselon II : Pusdiklat BPS

Visi Pusdiklat BPS

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005 - 2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 - 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk itu pada tahun 2015-2019 BPS menetapkan visi “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan berpedoman pada visi BPS, Pusdiklat BPS menetapkan visi tahun 2015 - 2019:

“Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”.

Dengan visi Pusdiklat BPS 2015-2019, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM dalam menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Di samping itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Misi Pusdiklat BPS

Misi Pusdiklat BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015 - 2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi Pusdiklat BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tabel 2.1 dipaparkan pernyataan visi dan misi Pusdiklat BPS tahun 2015 – 2019.

Tabel. 2.1 Pernyataan Visi dan Misi Pusdiklat BPS 2015 - 2019

		MISI PUSDIKLAT BPS 2015 - 2019
		<p>Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah</p>

Pernyataan misi Pusdiklat BPS yang dikaitkan dengan Visi Pusdiklat BPS djabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.

2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pengelolaan asset BMN dan administrasi keuangan.
5. Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

Tujuan Pusdiklat BPS

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pusdiklat BPS maka dirumuskan tujuan Pusdiklat BPS yang dipaparkan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pusdiklat BPS 2015-2019

VISI PUSDIKLAT BPS 2015 - 2019	Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah	MISI PUSDIKLAT BPS 2015 - 2019
		1.Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional
		2.Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks
		3.Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik
		4.Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pengelolaan asset BMN dan administrasi keuangan
		5.Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai
TUJUAN 2019	<p>1. Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar.</p> <p>2. Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan hardware, software dan modul yang lengkap.</p>	

Rumusan tujuan Pusdiklat BPS untuk mewujudkan misi Pusdiklat BPS dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar, terkait dengan :

- 1.1 Misi ke 1 : Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan

statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.

- 1.2 Misi ke 2 : Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
- 1.3 Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.

Tujuan 2 : Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan, terkait dengan :

- 2.1 Misi ke 4 : Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pengelolaan asset BMN dan administrasi keuangan.

Tujuan 3 : Peningkatan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan hardware, software dan modul yang lengkap, terkait dengan :

- 3.1 Misi ke 5 : Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Pusdiklat BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan Pusdiklat BPS 2015 - 2019

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	90%	92%	94%	95%	96%
2	Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67 poin	70 poin	72 poin	74 poin	75 poin
3	Peningkatan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan hardware, software dan modul yang lengkap	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam kondisi baik	90%	91%	92%	93%	95%

Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Pusdiklat BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program Pusdiklat BPS yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS.

Atas dasar tujuan Pusdiklat BPS, maka disusunlah sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan
2. Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan
3. Terpenuhinya sarana prasarana aparatur BPS.

Pada tabel 2.4 dapat terlihat hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dari Pusdiklat BPS.

Tabel. 2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar	SS.1 Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan
T2. Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan	SS. 2 Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan
T3. Peningkatan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan hardware, software dan modul yang lengkap	SS. 2 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur BPS

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis dalam rangka mencapai Visi Pusdiklat BPS dan mewujudkan Misi Pusdiklat BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar", adalah:
 - 1.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan

Dengan indikator sasaran:

 - 1.1.1. Jumlah kelas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
 - 1.1.2. Persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan
 - 1.1.3. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik
 - 1.1.4. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat
 - 1.1.5. Persentase surat izin belajar yang diselesaikan
 - 1.1.6. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan", adalah:
 - 2.1 Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan

Dengan indikator sasaran:

- 2.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- 2.1.2. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam kondisi baik
- 2.1.3. Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik
- 2.1.4. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu
- 2.1.5. Jumlah laporan dukungan manajemen

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan hardware, software dan modul yang lengkap", adalah:

3.1 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur BPS

Dengan indikator sasaran:

- 3.1.1. Persentase pengadaan kendaran bermotor yang diselesaikan
- 3.1.2. Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan
- 3.1.3. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan
- 3.1.4. Persentase pengadaan tanah, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

Program dan Kegiatan Pusdiklat BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar	SS.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan	1. Peningkatan terselenggaranya diklat yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah dan ragam ketrampilan SDM dengan mengupayakan penambahan SDM dan melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai, Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi serta manajemen, Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi para pengajar/ Widyaiswara (WI) Pusdiklat melalui berbagai diklat dan tugas belajar, Meningkatkan jumlah dan kompetensi para WI dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pengiriman WI untuk mengikuti Diklat Training of Trainers (TOT) WI pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). 	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)
T.2. Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan	SS.1. Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan	1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap pengelolaan asset BMN Pusdiklat BPS	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan sistem pengelolaan asset BMN Pusdiklat BPS Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang transparan 	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.3. Peningkatan sarana dan prasarana diklat dengan melengkapi kebutuhan hardware, software dan modul yang lengkap	SS.1.Terperuhnya sarana prasarana aparatur BPS	1. Pemenuhan sarana dan prasarana Pusdiklat BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima kegiatan diklat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana Pusdiklat BPS yang mendukung pelayanan prima kegiatan diklat, 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana Pusdiklat BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kegiatan diklat. 	Program PSPA	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS dan Operasional Perkantoran Lainnya

Matriks Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Pusdiklat BPS

TUJUAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (DALAM MILIAR RUPIAH)					PELAKSANA	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
T.1. Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar	SS.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan						32,30	41,99	44,82	48,08	51,88	Tata usaha	
	IKSS 1.1. Jumlah kelas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan	33	23	22	22	22						DPK	
	IKSS 1.2. Persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	91%	92%	93%	94%							
	IKSS 1.3. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	92%	94%	95%	96%							DTF
	IKSS 1.4. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	100%	100%	100%	100%	100%							DPK dan DTF
	IKSS 1.5. Persentase surat izin belajar yang diselesaikan	242	265	280	320	324							Tata Usaha
IKSS 1.6. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS												Tata Usaha	
T.2. Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan	SS.2. Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan						11,12	12,31	13,14	14,10	15,21		
	IKSS 2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75						Tata usaha	
	IKSS 2.2. Persentase sarana dan prasarana teknologi	90%	91%	92%	93%	95%						Tata Usaha	

**Lampiran 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Pendidikan
Dan Pelatihan BPS Tahun 2015**

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara BPS • Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan • Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan • Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik • Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap penyelenggaraan Diklat • Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan • Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Kelas Peserta Peserta Persen Persen Pegawai	33 90 90 90 100 242	44.881.380.000,-

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS dan Operasional Perkantoran Lainnya • Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 	Poin	67	3.351.971.000,-

Lampiran 4. Reviu Pengukuran Kinerja Sasaran Pusdiklat BPS Tahun 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Heru Margono, M.Sc.
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Adi Lumaksono, M.A.
Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 5 Oktober 2015
Pihak Pertama

Dr. Heru Margono, M.Sc.
NIP. 19610214 198312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelas	33
	Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Peserta	90
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Peserta	90
	Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap penyelenggaraan Diklat	Persen	90
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	242
2. Terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	67

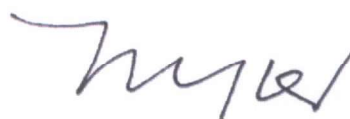
Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	Rp. 43.425.174.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	Rp. 2.892.815.000
Jumlah	Rp. 46.317.989.000

Pihak Kedua



Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 5 Oktober 2015
Pihak Pertama



Dr. Heru Margono, M.Sc.
NIP. 19610214 198312 1 001

**Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja Pusdiklat BPS
Tahun 2015**

NO	SASARAN/TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2015	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33	41	120,00
		Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	96,80%	107,56
		Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	100%	111,11
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	87,95%	97,72
		Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100,00
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	242	100,00
2	Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	58,54	87,37
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran/Tujuan					103,39

Lampiran 6. Sumber Daya Manusia Pusdiklat BPS

**Jumlah Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusdiklat BPS
Menurut Kelompok Umur dan Eselon Tahun 2015**

ESELON	Kelompok Umur											Jumlah
	<=20	21 - 24	25 -29	30 - 34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55	56	56+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
IV	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	6
Jumlah	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	2	10

**Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS
Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2014**

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengatur	II/c	3
2.	Pengatur Tk I	II/d	4
3.	Penata Muda	III/a	3
4.	Penata Muda Tk I	III/b	18
5.	Penata	III/c	7
6.	Penata Tk I	III/d	22
7.	Pembina	IV/a	8
8.	Pembina Tk I	IV/b	6
9.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
10.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
11.	Pembina Utama	IV/e	-
Jumlah			73

**Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS
Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2015**

No.	Unit Organisasi	Jenis Jabatan						Jumlah
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kepala Pusdiklat	-	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	-	-	1	2	-	30	33
3.	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	-	-	1	2	-	10	13
4.	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	-	-	1	2	-	7	10
5.	Widyaiswara	-	-	-	-	16	-	16
Jumlah		-	1	3	6	16	47	73

